

Pergeseran Aliansi Atas Kalkulasi Kekuatan Negara-Negara Besar Pasca Kejatuhan Rezim Assad di Suriah

Windratmo Suwarno¹

Fungsional Diplomat Madya, Kementerian Luar Negeri, Indonesia

ratmo70@gmail.com

Abstrak

Perubahan yang mendasar akibat jatuhnya rezim Bashar al Assad di Suriah menandakan terjadinya pergeseran aliansi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Rezim ini jatuh akibat terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri yang sudah jenuh dengan pemerintahan diktator Assad yang berkuasa sejak tahun 2000. Hancurnya kekuasaan ini memberikan dampak atas pergeseran kekuasaan yang dinamis secara regional maupun internasional. Dalam arti lain terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di wilayah negeri Syam. [1] Dalam menganalisis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang mendapatkan sumber sekunder dari berbagai tulisan atau penelitian ilmiah yang terdapat pada jurnal ilmiah dan berbagai berita yang tersedia di media cetak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengamati mengapa kekuatan Assad dapat hancur di Suriah pasca melemahnya kekuatan Iran dan Rusia di Suriah.

Kata-kata kunci: Suriah, Damaskus, Bashar, Assad, Hizbullah, Israel, Timur tengah

PENDAHULUAN

Suriah merupakan negara yang memiliki wilayah yang strategis, perbatasan dengan Lebanon sebagai negara tempat para oposisi Presiden Bashar seperti kelompok separatis *al-Qaeda Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS). Suriah juga memiliki pengaruh atas perdamaian di kawasan. Seperti yang diutarakan oleh Henry Kissinger, bahwa *"there can be no war in the Middle East without Egypt and no peace without Syria"* (Drysdale dan Hinnebusch 1991, 2). Perdamaian dengan Israel dapat terwujud

ada perdamaian antara Suriah dan Israel. Selain itu, Suriah berada di wilayah strategis berada di jantung Timur Tengah, perbatasan dengan Israel, Turki, Jordan, Irak dan Lebanon, berada di persimpangan Laut Tengah, dan Teluk Persia, serta antara benua Afrika dan Eurasia. Posisinya ini memudahkannya mendukung kelompok perlawanan dan dapat mengancam keberadaan Israel.

Di samping itu, terdapat kelompok perlawanan yang mendukung Pemerintahan Assad seperti Hizbullah yang juga bersamaan pandangan politik yang tidak

menyetujui kolonial Israel di wilayah pendudukan Palestina. Namun demikian, Israel telah mampu melumpuhkan kekuatan pendukung rezim Assad secara bertahap dengan upaya melemahkan dukungan Iran terhadap kelompok Hizbullah. Kelompok ini mendukung penuh kepemimpinan Assad dan bahkan membantu kekuatan militer dalam mempertahankan kekuasaan Presiden Bashar. Pendukung Presiden Assad yang setia yaitu Hizbullah telah surut dan melemah secara bertahap akibat wafatnya Hassan Nasrallah yang diungkap oleh Hizbullah akibat serangan udara Israel di Beirut.

Dengan adanya pelemahan dukungan dari kelompok Hizbullah dan meningkatnya kekuatan oposisi Suriah, maka terjadi perubahan konstelasi politik di kawasan yang tadinya Suriah memiliki dukungan pertahanan militer dari Iran menjadi berkurang akibat Israel mampu melemahkan kekuatan militer di Suriah. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana konstelasi kekuatan tiga kelompok yaitu Hizbullah, Hamas dan Iran terhadap kondisi pemerintah Assad untuk mempertahankan kekuasaannya.

Ketika pasukan pemberontak merebut Damaskus pada 8 Desember 2024 untuk menggulingkan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad (2000-24), merupakan suasana euforia selama 54 tahun terjadi kediktatoran brutal di Suriah. Warga Suriah segera turun ke jalan-jalan untuk merayakan, dan posting media sosial

bersuka-cita bahwa “selamanya telah jatuh” (*saqata saqata al-abadal-abad*), dan membuktikan bahwa rezim lama Assad sudah jatuh. Kondisi ini seperti halnya ayahnya Hafez al-Assad (1971–2000), yang memiliki ambisi dinasti keluarga Assads.

Setelah lebih dari satu dekade perang saudara, rezim dan lawan-lawannya, yang telah berjuang sejak pemberontakan 2011, terkunci dalam jalan buntu. Kemudian, pada akhir November 2024, pasukan pemberontak memulai serangan yang akhirnya menjatuhkan rezim menunjukkan kepada warga Suriah bahwa tidak ada yang permanen, bahkan dinasti. Rezim Assad telah mempertahankan kekuasaannya, melalui penindasan yang keras, menjalankan sistem penahanan yang besar dan terkenal barbar di mana ribuan tahanan mengalami penyiksaan dan kekejaman yang tak terbayangkan. Ketika tahanan yang dipenjara dibebaskan, beberapa dari mereka yang muncul tidak menyadari bahwa Hafez al-Assad telah meninggal hampir seperempat abad yang lalu; ada anak-anak yang lahir di penangkaran yang tidak pernah menghirup udara luar ruangan. Apapun yang terjadi selanjutnya, bab penderitaan Suriah ini sudah berakhir (Adar,2025)

Pemberontak di Damaskus berhasil menguasai wilayah Suriah pada 8 Desember 2024, sehingga mendorong Presiden Bashar al-Assad melarikan diri ke Rusia setelah terjadi 13 tahun perang

saudara. Keadaan ini telah mengakhiri kekuasaan rezim Assad yang bertangan besi. Perang saudara ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi Suriah yang mana 90 persen penduduknya berada di garis kemiskinan. Dengan dicabutnya subsidi makanan dan bahan bakar memperburuk krisis kemanusiaan dan mendorong rasa permusuhan. Tentara Suriah telah kehilangan 100.000 pasukan sejak 2011 akibat dari peperangan, pengkhianatan dan dispersi serta menghadapi kekurangan sumber daya setelah serangan Israel. Sebaliknya kelompok pemberontak secara efektif dimobilisasi, dilatih dan direkrut untuk menyerang rezim. Lebih dari itu, sekutu Assad juga diperlemah seperti Hezbollah yang didukung oleh kelompok perlawanan Hamas di Gaza untuk menghadapi Israel di bawah pengaruh regional Iran yang semakin berkurang dan batasan sumber daya Rusia akibat perang Ukraina (Aljazeera,2024).

Ketika kelompok-kelompok oposisi mengambil-alih urusan Suriah, beberapa tantangan mendesak telah muncul. Pertama, ada risiko meningkatnya polarisasi dan perselisihan sektarian, meningkatkan momok perang saudara lain. Populasi Suriah yang beragam, yang meliputi Sunni, Alawi, Kristen, Kurdi, dan Druze, menjadi semakin terfragmentasi selama konflik sebagai rezim Assad dan aktor regional dan internasional dieksploitasi divisi untuk memajukan kepentingan mereka. Demikian pula,

prospek pemerintahan Islam menimbulkan ancaman meminggirkan kelompok non-Sunni, khususnya Alawi dan Kristen. Skenario ini mengingatkan pada gejolak pasca-2003 Irak, di mana jatuhnya pemerintahan sekuler menyebabkan meningkatnya sektarianisme dan munculnya kelompok - kelompok ekstremis seperti ISIS. Yaman dan Libya juga mengalami kekacauan menyusul perubahan rezim, dengan perpecahan sektarian mengintensifkan konflik. Tantangan lain termasuk menstabilkan negara, memastikan perlindungan pembangkang politik, dan mengatasi status mantan pejabat rezim Assad (Hamdach,2025).

Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Sharaa, telah berjanji untuk membentuk pemerintahan transisi yang inklusif dan menghormati semua sekte agama. Namun, kekhawatiran tetap ada tentang kepemimpinannya. Sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammed al-Jolani, Sharaa memimpin kelompok pemberontak militan yang bersekutu dengan Islamis dan *al-Qaeda* Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), yang berhasil memberontak menggulingkan Assad. Dalam beberapa tahun terakhir, Sharaa telah mengubah retorikanya, menghadirkan HTS sebagai entitas yang cenderung lebih nasionalis yang mengadvokasi kepentingan Suriah. Dia telah berusaha untuk menemukan kembali dirinya dengan meninggalkan hubungannya dengan al-Qaeda, menggunakan nama aslinya bukan nama

perangnya, mengadopsi lemari pakaian yang lebih bergaya Barat, dan membuat pernyataan publik moderat dalam wawancara dengan media internasional.

Sejauh ini, pemerintah sementara tetap berkomitmen secara terbuka untuk memberikan transisi politik yang demokratis. Di antara langkah-langkah lain, Sharaa telah meluncurkan dialog nasional tentang transisi politik dan berjanji untuk melindungi berbagai komunitas minoritas dan meningkatkan toleransi beragama. Menggambarkan “era baru yang jauh dari sektarianisme,” yang menegaskan bahwa tidak ada sekte yang akan dikecualikan di Suriah.

Kekerasan sektarian, bagaimanapun, telah muncul kembali di Suriah. Pada Maret 2025, setelah penyergapan oleh loyalis Assad, serangan balasan menargetkan komunitas Alawit di wilayah pesisir barat Suriah. Serangan-serangan ini mengakibatkan kematian ratusan warga sipil Alawit, menandai salah satu episode paling mematikan dari kekerasan sektarian sejak perubahan rezim. Komunitas Kristen di Suriah juga menghadapi ancaman baru di tengah transisi politik yang sedang berlangsung. Insiden penting termasuk pembakaran pohon Natal di Suqaylabiyah oleh pejuang Islam dan serangan terhadap sebuah gereja oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kota Hama pada bulan Desember. Insiden-insiden ini memicu kekhawatiran luas di kalangan penduduk Kristen dan memicu protes di Damaskus yang menuntut perlindungan bagi minoritas

dan pengusiran pejuang asing dari Suriah (Idibi,2025).

Dalam upaya untuk mencegah perang saudara lain, negara-negara Arab telah memulai dialog awal dengan para pemimpin baru Suriah dan pasukan di lapangan. Bersemangat untuk mengamankan stabilitas di kawasan itu, para pemimpin Arab telah bersumpah untuk mendukung proses transisi damai yang termasuk semua warga Suriah, terlepas dari latar belakang etnis dan agama mereka. Demikian juga, diplomat Arab bertujuan untuk melihat HTS bubar dan transisi ke organisasi politik baru yang meninggalkan terorisme, sebuah langkah yang akan meningkatkan legitimasi pasca-Assad Suriah di panggung global.

Proses politik ini terkait dengan penanganan ekonomi Suriah. Penarikan sanksi, bantuan rekonstruksi dan investasi asing merupakan masalah penting untuk membangun infrastruktur dan mengembalikan pelayanan dasar. Namun demikian badan donor internasional masih ragu untuk membantu tanpa ada jaminan nyata bahwa struktur pemerintahan akan bebas dari masalah korupsi, dan stabil. Selain itu, negara donor menekankan agar Suriah yang baru tidak akan menjadi entitas Jihadist Salafi, tempat aman bagi teroris yang akan membuat instabilitas wilayah. Pemerintah transisi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan pengaruh antara Turki dan Arab Saudi dan merespon perhatian dari Mesir, Yordan dan UEA. Pemerintah baru juga harus

memprioritas ketidaktergantungan dari senjata kimia sebagai bentuk ancaman bagi negara Barat.

Perhatian utama dari pasca-Assad adalah resiko perpecahan Suriah yang menjurus ke arah perang Saudara. Tanpa ada pemerintahan yang kuat untuk mengatasi masalah nasional maka berbagai kelompok bersenjata akan segan untuk mengakui pemerintahan baru yang berkuasa dan sebagian lainnya akan mencari wilayah kekuasaan yang baru. Sejak terjadi perang saudara di Suriah pada tahun 2015, Rusia memprakarsai terbentuknya Format Astana beberapa tahun kemudian. Dalam kerangka kerja ini, terjadi kerja sama antara Turki dan Iran untuk menyelesaikan konflik di Suriah dan menghilangkan pengaruhnya di Suriah. Sebagai hasilnya, keseimbangan kekuatan di Suriah bergeser yang menimbulkan munculnya aktor regional dan internasional. Dukungan negara luar terhadap oposisi Suriah berhenti untuk menjatuhkan rezim dan memprioritaskan kepentingan ekonomi, keamanan dan nasionalnya. Misalnya AS berupaya untuk memendam perlawanan *Islamic State* (IS), Turki juga berusaha untuk mencegah berdirinya wilayah yang dikuasai oleh Kurdist-didominasi *Syria Democratic Force* (SDF) di perbatasan belahan selatan dan menyerukan kembalinya pengungsi Suriah. Sedangkan Israel tetap masih netral dalam memantau perjuangan internal rakyat Suriah, dan masuknya dukungan

persenjataan ke Hezbollah (Wedeen, 2025).

Di dunia internasional, Suriah juga diterima kembali dalam Liga Arab yang dalam keanggotaannya telah hentikan pada tahun 2011. Hal ini merupakan bentuk dukungan dari Uni Emirat Arab dan negara tetangga Suriah serta upaya pendekatan kembali antara Arab Saudi dan Iran. Faktor faktor eksternal lainnya juga menjadi salah satu penyebab atas kejatuhan rezim Assad. Hal yang penting adalah pergeseran keseimbangan ini terjadi ketika Hamas dan kelompok bersenjata Palestina berhadapan dengan Israel pada 7 Oktober 2023. Setahun kemudian pada Oktober 2024, poros perlawanan yang dipimpin Iran mampu memperlemah operasi militer Israel. Di lain pihak, Hezbollah di Lebanon berusaha melawan Israel dibantu oleh Iran dan Rusia dalam melindungi Rezim Assad. Dukungan ini melemah setelah militer Rusia memfokuskan perlawanan dengan Ukraina. Keadaan ini sangat mempengaruhi dukungan dari pemain regional dan internasional di Suriah yang membuat jalan bagi kekuatan pemberontak mengambil kekuasaan rezim Assad pada Desember 2024.

Turki merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pergantian rezim di Suriah. Intelijen dan militer Turki tidak hanya memonitor tetapi juga secara langsung mendukung *Syria National Army* (SNA) dan suku-suku Arab. Dua bulan sejak digulingkannya rezim Assad, militer

Turki hadir di Utara Suriah, khususnya di Idlib dan sekitar Aleppo, di mana kehadirannya telah dipertahankan sejak 2017. Kelompok lain yang berpengaruh adalah *Hay'at Tahrir al-Sham* (HTS) dan SNA yang terdiri dari elemen *Free Syrian Army* (FSA dan Islamic Front) yang dekat dengan Turki. Sejak 2015-2015, Ankara mengadakan berbagai perjanjian dengan kelompok bersenjata dan mulai memperkuat mereka untuk menjatuhkan rezim. Pada mulanya Turki memfokuskan pada kejatuhan Assad dan menghalangi berdirinya otonomi rakyat Kurdish, dibawah kepemimpinan PYD/YPG merupakan afiliasi PKK Suriah yang ditandai sebagai organisasi teroris oleh Turki, Uni Eropa dan AS (Radford, 2024).

Turki juga mendanai kelompok SNA secara finansial dan logistik yang beroperasi di wilayah Utara Suriah yang secara bertahap dikuasai oleh Turki antara 2016 dan 2019 dan berintegrasi secara ekonomi dan administrasi Turki. Pada 2020, Turki juga menggarap kedekatan dengan HTS, khususnya ketika rezim Assad akan mengambil alih Idlib. Serangan pemberontak tahun 2024 tidak akan terjadi tanpa lampu hijau dari Turki. Meskipun Turki kurang mendukung pemberontakan, namun Turki juga berkepentingan dengan rezim Suriah untuk mengembalikan pengungsi Suriah.

Faktor External dari negara-negara Arab juga menyumbang dalam kejatuhan rezim Assad. Pada 2011-2013 Qatar, Arab Saudi dan UEA telah mendukung

pemberontakan di Suriah. Qatar dan UEA mendukung pemberontak Islam, Salafis dan Jihadist. Antara 2015-2017, Arab Saudi tidak lagi menjadi pemain utama ketika UEA mengundurkan diri dari dukungannya terhadap pemberontak. Beberapa tahun silam, kelompok pemberontak *Salafis-Ahrar al Sham* adalah mitra penting dari Qatar. Bersamaan dengan itu, Qatar dan Turki juga mendukung kelompok Jihad *Nusra Front* yang berasal dari al-Qaeda. Selain itu, Qatar memiliki pengaruh pada pemimpin Nusra Abu Mohammed al-Jawlani dan pengikutnya yang dirikan tahun 2017 (Loft & Clairse, 2025).

Negara lainnya yang paling berpengaruh adalah Iran yang memainkan peran besar untuk menjamin keberlangsungan rezim Assad. Iran melakukan intervensi dalam perang saudara di sisi Assad dan menghabiskan beberapa dekade untuk membangun infrastruktur militer di Suriah. Ini termasuk lokasi strategis persenjataan dan mensuplai logistik militer Hezbollah di Lebanon dan termasuk jaringan militan lokal dan asing. Pada saat yang bersamaan, Iran memperoleh pengaruh politik atas aparat militer dan keamanan Suriah. Sedangkan di bidang diplomasi, Iran bersama Rusia dan Turki terikat dengan perjanjian Astana.

Walaupun Iran secara intensif terlibat di Suriah, namun tidak sanggup mencegah kehancuran rezim Suriah pada 2024. Faktor kunci adalah terkikisnya dukungan dan pengaruh militer Iran di

Suriah adalah karena Iran menarik fasilitas militer dan personel tentaranya. Sebaliknya Assad berusaha untuk mencari dukungan dari negara-negara Arab yang menuntut pengurangan pengaruh Iran. Di samping itu, militer Israel berupa terus melakukan intersep pesawat tempurnya ke fasilitas dan militan Iran di Suriah, yang mendorong Iran menarik personel militernya. Selain itu, faktor penting lainnya adalah kurangnya kesigapan militer Suriah yang tidak memiliki motivasi mendukung rezim Assad (Radford, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Rusia - Suriah

Rusia merupakan negara yang gencar mendukung dan mempertahankan pemerintahan Assad dari September 2015, tidak dapat mencegah kehancuran pemerintahan Assad pada akhir 2024. Hal ini karena, Rusia ingin fokus menghadapi perang dengan Ukraina. Untuk itu, kehadiran militer Rusia sangat terbatas. Pada tahun 2004 diperkirakan personel militer Rusia mencapai 7500 orang terdiri dari kekuatan udara, tentara khusus dan polisi militer. Sejak terjadi perang Ukraina, pasukan ini menurun dua kali lipat di tahun 2022 dan bahkan terbatas pada 2023 ketika terjadi konfrontasi penyerangan pemberontak. Pasukan Assad hanya dapat bertahan tidak lama dan kemudian menyerah serta hancur termasuk Korps angkatan kelima yang menerima dukungan logistik dan finansial dari Rusia. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 2024, Assad dan

keluarganya melarikan diri mencari suaka politik ke Rusia (Loft, 2025).

Kehancuran rezim Assad telah mengubah pergeseran kesimbangan kekuatan di wilayah dan sekitarnya. Pengaruh Iran dan Rusia telah melemah, sedangkan Turki dan Qatar mulai mendukung pemerintah baru Suriah. Israel telah mampu untuk meningkatkan posisi strategisnya di wilayah tersebut. Jatuhnya rezim Assad merupakan pertanda kehancuran reputasi terbesar Rusia di wilayah ini. Setelah berakhirnya Perang Dingin, pengaruh Rusia sangat menurun sejak terjadinya Perang Irak tahun 2003 hingga musim semi Arab (Arab Spring). Namun sejak Rusia mulai mendekat dengan Suriah pada 2015, ia mulai percaya diri menjadi faktor kunci di wilayah sebagai negara adidaya (Loft, 2025).

Rusia berupaya untuk menjadi prioritas bagi Assad dalam mempertahankan kekuatan militer lautnya dan pertahanan udara di Tartus. Hal ini tidak hanya penting bagi operasi militer, tetapi juga basis angkatan laut Mediteranian dan akses ke Laut Merah. Sejak terjadi pembatasan kapal perang melalui Bosporus pada waktu terjadinya invasi Ukraina, Tartus merupakan tempat penting bagi perbaikan kapal dan fasilitas persediaan logistik.

Hubungan Iran – Suriah

Kejatuhan rezim Assad merupakan hal yang paling kelam bagi pengaruh Iran dan ambisi strategisnya khususnya bagi

poros pertahanan. Secara geografi, Suriah merupakan komponen penting sebagai koridor yang berhubung Iran ke Hezbollah di Lebanon dan pantai mediteranian melalui Irak. Koridor ini sangat penting untuk transfer persenjataan dan dukungan logistik ke Hezbollah. Namun demikian, kemampuan militer ini diperlemah akibat perang yang berkecamuk dengan Israel. Hancurnya koridor ini merupakan hal yang sulit bagi Iran untuk mempersenjatai kembali Hezbollah dan mempertahankan jaringan perbatasan regional dengan sekutu militan.

Jaringan ini di bawah kekuasaan Assad, Suriah memainkan peran penting bagi geo-ekonomi ambisi. Iran mendukung posisinya sebagai pemain penting atas Inisiasi Jalur Darat dan menguntungkan Suriah sebagai jaringan jalur darat. Lebih dari itu, sejak peningkatan pengaruh Turki telah mengancam Iran secara geopolitik tidak hanya di wilayah Syam, tetapi juga Irak. Penyelundupan potensi dari kelompok Jihadist di Suriah seperti IS telah menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan regional Iran yang merupakan sebagai ancaman bagi sekutu Iran dan Irak.

Hubungan Turki – Suriah

Dengan kejatuhan rezim Assad, Turki yakin bahwa terdapat banyak celah untuk melakukan diplomasi terhadap Suriah. Sejak 2020, Turki tidak mampu untuk melakukan manuver diplomasi. Hal ini karena kepentingannya untuk

mencegah berkembangnya pemberontak Kurdish di belahan Utara dan upaya memfasilitasi kembalinya pengungsi Suriah. Untuk menghadapi ini, Turki menjalankan dua strategi yaitu melakukan normalisasi hubungan dengan Assad dan melancarkan operasi militer di Utara Suriah untuk menuntut keluarnya Kurdish yang didominasi SDF seperti kota Tel Rifaat dan Manbij. Namun strategi ini gagal. Tidak ada kompromi yang dicapai dengan Assad dan upaya normalisasi untuk menghadapi halangan dari kelompok oposisi Suriah.

Jatuhnya Assad menandakan momen yang berharga bagi Turki untuk mencegah otonomi Kurdish di bagian utara Suriah. Turki diperkirakan juga akan mampu untuk meningkatkan pengaruhnya atas masa depan Suriah. Hal ini bahkan semakin nyata setelah melemahnya dukungan Iran terhadap Suriah dan belum ada resolusi perdamaian kembali antara Israel-Palestina. Untuk itu, dalam upaya untuk menstabilisasikan situasi di Suriah, Turki mengharapkan kerjasama dengan aktor regional seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Jordan dan Irak.

Arab Monarki dan Teluk Persia

Berakhirnya kekuasaan rezim Assad telah mengubah keseimbangan pengaruh di antara negara-negara Arab. Qatar sendiri mendukung kelompok jihadist seperti *Syrian Nusra Front* dan hal ini yang menyebabkan Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menerapkan blokade darat, laut dan udara pada tahun 2017. Dukungan

Qatar mendukung Jihadist seperti *Syrian Nusra Front* merupakan suatu alasan mengapa Arab Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir menerapkan blokade darat, air dan udara. Meskipun krisis berakhir 2021, tensi konflik diantara mereka bisa saja terjadi tiba-tiba.

Ketika pemerintahan Assad hancur dan HTS' mengambil alih kekuasaan merupakan faktor penting dari kebijakan Qatar sejak Musim Semi Arab 2011, karena Qatar mendukung berbagai orientasi kelompok Islamist sebagai kekuatan di masa depan dan dipercaya, hal ini akan memperkuat pengaruh regional. Pada 2018, Qatar menjadi arab pertama yang memperbaiki kembali hubungan dengan Suriah setelah mem-bekukan hubungan sejak terjadi perang saudara dan merehabilitasi Suriah ke dalam dunia Arab. Sejak itu, hubungan Suriah dan Iran mulai merenggang sesuai dengan kebijakan UEA. Sedangkan Arab Saudi masih menjaga jarak dengan Suriah, meskipun mendukung pergantian kekuasaan dan tidak segera memperbaiki hubungan dengan Assad hingga 2023. Arab Saudi mengkhawatirkan pengaruh yang lebih luas kelompok Islamist di Suriah. Pada saat yang bersamaan, Arab Saudi juga menyambut baik lemahnya pengaruh Iran dan Hezbollah. (Singh, Ahmad, 2024).

Hubungan Israel – Suriah

Kehancuran pemerintah Assad membuat Israel semakin memiliki tempat dan pengaruh atas kekuatannya atas lemahnya Hamas, Hezbollah dan Iran ketika terjadi serangan 7 Oktober 2023. Segera setelah kejatuhan Assad, Israel mendeklarasi penghentian perjanjian gencatan senjata dan operasi “Arrow of Bashan” Israel-Syria 1974. Tujuan Israel adalah untuk mendirikan pos observasi di pegunungan Hermon untuk memantau Lembah Beqaa, yang merupakan zona baru penyanggah Hezbollah dan penangkal pemberontakan di Suriah serta mencegah kehancuran senjata rezim Assad jatuh ke para pemberontak melalui pengawasan UNDOF misi di puncak pegunungan Hermon yang menyusuri bukit Golan yang dikuasai Israel 1967 dan dianeksasi 1981. Israel juga membangun pos pemeriksaan di luar zona penyanggah PBB dan ini merupakan kesempatan bagi Israel untuk menghancurkan sebagian besar kapabilitas militer Suriah.

Angkatan Udara Israel sudah lebih dari 130 kali melakukan manuver ke arah wilayah Suriah. Bahkan kurang dalam 48 jam hampir 70-80 persen kapasitas militer Suriah berhasil dihancurkan, termasuk pertahanan udara dan sistem radar. Sehingga halangan bagi Israel dalam menghadapi Iran kemungkinan lebih mudah. Pada pertengahan Desember 2024, Israel mengumumkan rencana memperluas pemukiman dua kali lipat orang Israel di Dataran Tinggi Golan. Pergerakan ini nampaknya tidak akan

membawa jalan menuju resolusi perdamaian dengan Suriah yang sudah tidak lagi memiliki kekuatan.

Amerika Serikat

Keseimbangan kekuasaan di Suriah dan pada wilayah perbatasan telah menggeser dukungan AS: melemahnya kekuasaan rezim Assad dan Iran serta sekutunya merupakan keuntungan bagi AS. Washington terus menerus melakukan kampanye perlawanan terhadap SDF yang didominasi Kurdish, sedangkan Turki dan SNA secara aktif menargetkan SDF. Di waktu yang bersamaan, Suriah menginginkan integrasi pejuang SDF ke dalam pasukan baru, meskipun secara individual bukan keanggotaan SDF. Perjanjian perdamaian ini ditolak pemerintahan AS antara HTS dan SDF, sebaliknya juga antara SDF dan Turki.

Pemerintahan AS hingga kini masih belum menentukan sikap dan kebijakannya pada pemerintahan baru Suriah. Hal yang mempengaruhi perpanjangan kehadiran pasukan militer AS di wilayah Suriah di masa mendatang dan kemitraannya dengan SDF. Kehancuran Assad telah membuat AS menahan diri dari keterlibatan dinamika internasional dan bahkan Penasihat Keamanan AS menyampaikan agar AS tidak ikut campur dalam masalah dalam negeri Suriah. Sebaliknya Menlu AS Marco Rubio pada Januari 2024 agar AS terus melakukan pendekatan dengan Suriah dan mendukung perjuangan SDF. Masalah yang paling menjadi perhatian AS

adalah bahwa Suriah tidak lagi menjadi sumber dari terorisme internasional.

Masa Depan Suriah

Kejatuhan rezim Assad telah membuat ketidakpastian yang menimbulkan berbagai kemungkinan skenario ke depan tergantung pada aktor domestik dan internasional. Ketiga kehancuran rezim telah mengakhiri bab kerusakan, jalan menuju stabilitas dan inklusif pemerintah Suriah telah terbuka. Beberapa skenario yang berpotensi bagi masa depan ke depan Suriah antara lain:

Pertama adalah skenario optimistik ke jalan stabilitas. Hal ini adalah skenario terbaik membawa kepemimpinan baru di bawah HTs yang sukses melakukan transisi dari kekuatan militer kepada otoritas kepemimpinan. HTS dipimpin oleh Abu Mohammed al-Jawlani yang berjanji secara inklusif melindungi minoritas, membentuk pemerintahan transisi dan membawa kelompok oposisi koalisi menjadi bentuk pemerintahan baru disamping aktor masyarakat sipil dan kaum teknokrat.

Skenario ini didukung oleh negara donor internasional yang dipimpin oleh AS, Uni Eropa dan negara-negara Teluk yang menyediakan dukungan substansi untuk pembangunan gedung dan institusi. Infrastruktur kunci diperbarui dan pengungsi Suriah mulai kembali, serta menciptakan pembenahan ekonomi dan penyatuan sosial. Dalam dunia internasional, aktor global dan regional

mengakui pemerintahan transisi, keterlibatan diplomatik dengan mekanisme inklusif dan perlindungan HAM. Rusia dan Turki memainkan peranan dalam pembangunan konstruksi untuk menstabilkan situasi, sehingga dapat mencegah perjuangan kekuatan diantara faksi oposisi. Di lain pihak juga ada tindakan pencegahan terhadap aksi terorisme, yang didukung koalisi internasional, mencegah penyusupan ISIS dan kelompok ekstrimis lainnya. Keadaan ini akan mendorong secara bertahap pembangunan ekonomi kembali dan struktur pemerintahan (Suwarno, 2013).

Ada skenario yang pesimis atas perpecahan dan ketidakstabilan ini akan mengakibatkan skenario terburuk atas kehancuran Suriah. Keadaan ini dapat disebabkan oleh pada divisi internal antara kelompok oposisi, dan turut campur pihak luar. HTS's berjuang untuk mempertahankan kesatuan dengan memerangi fraksi-fraksi yang memberontak dan kurangnya kekuasaan yang terpusat. Keadaan akan menyebabkan kekosongan kekuasaan yang akan memudahkan kaum ekstrimis termasuk ISIS untuk membangun kekuatan. Kekosongan keamanan ini akan memicu kekerasan dan pelarian penduduk sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan.

Situasi Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia

Kebutuhan kemanusiaan tetap

tinggi, dengan perkiraan 16,5 juta orang membutuhkan pada tahun 2025. Kekerasan yang sedang berlangsung antara SDF dan SNA di Suriah timur laut pada awal 2025 menyebabkan perpindahan sekitar 1,1 juta orang dan korban sipil dan kombatan. Ada juga lebih dari satu dekade kerusakan luas pada infrastruktur Suriah, termasuk sekolah dan rumah sakit. Ada sekitar 4,5 juta pengungsi Suriah di wilayah tersebut, negara-negara tetangga yang mencari kembalinya. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional telah mulai terlibat kembali dengan Suriah pada tahun 2025, sebagian mencerminkan pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat dan lainnya (Weeden, 2025).

Ada juga insiden kekerasan terhadap kelompok minoritas di Suriah, termasuk Alawi (terkait dengan pemerintah Assad, ia menjadi Alawit), Druze (yang Israel telah berjanji untuk mendukung) dan Kristen. Sejumlah besar korban dilaporkan di daerah pesisir Alawit di Suriah pada bulan Maret dan di daerah Druze di Suriah selatan pada bulan Juli. Sebuah laporan yang ditugaskan oleh pemerintah sementara tentang kekerasan Maret mengatakan bahwa asal-usulnya terletak pada "sis-sis" pasukan pro-Assad tetapi beberapa kelompok yang telah melakukan pelanggaran adalah anggota angkatan bersenjata sementara, bertindak dengan "tidak ada otoritas resmi". Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan presiden kolektif "sangat mengutuk" kekerasan yang meluas terhadap Alawi.

KESIMPULAN

Transisi menuju stabilitas yang damai ke Suriah yang demokratis dan sekuler sangat penting untuk masa depan negara. Dialog nasional yang inklusif di antara semua faksi politik, yang dipimpin oleh pemerintah Suriah, adalah kunci untuk representasi dan perdamaian. Demokratisasi dapat mempromosikan stabilitas dan mengurangi terorisme dan konflik sektarian, tetapi harus didorong oleh Suriah, dengan aktor eksternal memberikan dukungan tanpa mendikte hasil.

Namun demikian, Amerika Serikat sebagai negara adikuasa harus berkolaborasi dengan sekutu dan mitra regional untuk mendukung transisi demokrasi Suriah melalui kerangka kerja strategis terpadu. Dukungan harus mencakup tidak hanya bantuan keuangan, namun yang lebih penting adalah bantuan kemanusiaan, dan membuat perencanaan melalui pembangunan jangka panjang seperti membangun kemitraan ekonomi dan keamanan dengan pemerintah Suriah yang baru dan mendukung organisasi masyarakat sipil dan LSM. Selain itu, untuk memberi insentif pada reformasi positif yang berkelanjutan, dukungan ini harus bersyarat pada kemajuan yang dapat dibuktikan untuk menuju demokratisasi.

Transisi demokrasi yang sukses di Suriah tidak hanya akan menguntungkan rakyat Suriah, tetapi memajukan kepentingan Amerika di wilayah tersebut.

Kelambanan atau kurangnya dukungan yang memadai dapat memberikan ruang dan kesempatan bagi Iran dan Rusia untuk mendukung penuh Suriah dan mengejar tujuan strategis yang bertentangan dengan prioritas AS, seperti mencegah kebangkitan Negara Islam dan memulangkan pengungsi kembali ke Suriah. Demikian pula, strategi non-keterlibatan berisiko meninggalkan Damaskus dengan sedikit pilihan tetapi sekali lagi beralih ke Moskow dan Teheran untuk bantuan dalam menangani kebutuhan mendesaknya, yang kemungkinan akan lebih lanjut menghasilkan kemunduran strategis bagi Amerika Serikat.

Untuk mencapai perdamaian abadi dan melindungi hak-hak minoritas di Suriah, pemerintah sementara harus mengadopsi kebijakan inklusif yang didukung oleh para pemangku kepentingan internasional yang mempromosikan toleransi beragama dan melindungi masyarakat yang rentan. Kolaborasi multilateral sangat penting untuk mengatasi perpecahan sektarian, dengan kekuatan regional, lembaga global, dan masyarakat sipil Suriah bekerja sama untuk membangun pemerintahan inklusif, mendorong rekonsiliasi, dan membangun pengawasan independen. Keterlibatan internasional dapat melegitimasi proses transisi, menyeimbangkan kepentingan yang bersaing, dan menyediakan sumber daya dan mekanisme akuntabilitas yang diperlukan untuk memastikan stabilitas dan mencegah kekerasan lebih lanjut atau

kebangkitan yang mengarah pada ekstremis.

Jika sektarianisme di Suriah tidak ditangani, konflik regional yang lebih luas bisa muncul, dengan Iran mendukung faksi-faksi Syiah seperti Alawi dan Arab Saudi yang mendukung kelompok - kelompok Sunni untuk menegaskan pengaruh. Ini mencerminkan konflik Yaman, di mana dukungan Iran untuk Houthi telah memperdalam ketidakstabilan. Untuk mencegah hasil yang sama di Suriah, pemangku kepentingan internasional harus bertindak untuk mengekang perpecahan sektarian dan mempromosikan tata kelola yang inklusif.

Kajian ini dapat menjadi suatu pembelajaran bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri untuk mengelola suatu konflik, melainkan perlu dukungan negara atau kelompok lain yang dapat membantu dukungan militer dan logistik. Konflik yang terjadi dalam suatu negara perlu diantisipasi dengan memberikan peluang bagi oposisi untuk memberikan masukan dengan adanya keterwakilan mereka di dalam pemerintah. Selain itu, pemerintahan perlu memiliki legitimasi dukungan dari rakyatnya dengan adanya pemilihan yang adil dan jujur dalam memilih eksekutif.

REFERENSI

Adar, Sinem, Assemlur, Muriel; Azizi, amidreza; Klein, Margarete dan

Steinberg, guido, 2025. The Fall of the Assad Regim: Regional and International Power Shifts, German Instute for International and Security Issues, [The Fall of the Assad Regime: Regional and International Power Shifts - Stiftung Wissenschaft und Politik](#) (diakses 14.06.2025)

AlJazeera, What happened in Syria? How did al-Assad fall?, 2024, December 8, <https://www.aljazeera.com/news/2024/12/8/what-happened-in-syria-has-al-assad-really-fallen>, (Diakses 25.07.2025)

Drysdale, Alasdair & Hinnebusch, dan Raymond A., 1991. Syria and the Middle East Process. New York: Council on Foreign Relations Press.

Hamdach, Widyane, the Fall of Bashar al-Assad: Winners, Loser, and Challenge Ahead, Georgetown Journal of International Affairs, 2025, May 7, <https://gjia.georgetown.edu/2025/05/07/the-fall-of-bashar-al-assad-winners-losers-and-challenges-ahead/>, (diakses 29.07.2025)

Idlbi, Qutaiba; Lister, Charles; Forestier, Marie, 2025. Reimagining Syria: A Roadmap for Peace and Prosperity Beyond Assad, Middle East Institute of Peace, March. [Reimagining Syria 3-25.pdf](#), (diakses 20.07.2025)

Loft, Philip & Mills, Clairese, 2025. Syria after Assad: Consequences and Interim Authoritties, July 23, , <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-10161/> (diakses 29.07.2025)

Radford, Antoinette, 2024. The Assad regime ruled Syria for 50 years. Here's how it fell in less than two weeks, CNN, December 9, 2024, <https://edition.cnn.com/2024/12/09/middleeast/timeline-syria-assad-regime-toppled-intl>, (diakses 29.07. 2025)

Shaban, Fateh, 2025. Rethinking Middle East Geopolitics after the Fall of the

Assad Regim Policy Analysis Fateh Shaban, Policy Analysis, Harmoon Center, April, <https://www.harmoon.org/en/researches/middle-east/> (diakses 29.07.2025)

Singh, Subhash & Ahmad, Saleem, 2024. Beyond Assad: The Syrian Civil War, Humanitarian Crisis, and the Path to an Inclusive Future, Journal of Peace Studies, Vo.32, Issue1, Januari-March, 2025

Suwarno, Windratmo, 2013. Dampak Strategi Suriah Menghadapi Israel terhadap Pergolakan di Suriah, https://www.academia.edu/5381470/Dampak_Strategi_Suriah_menghadapi_Israel_terhadap_Pergolakan_di_Suriah (diakses 29/07.2025)

Task Force, MENA, 2024. A New Chapter for Syria: Analyzing the Collapse of Assad's Regime, Dec 10, 2024, Beyond The Horizon. [https://A New Chapter for Syria: Analyzing the Collapse of Assad's Regime](https://A_New_Chapter_for_Syria_Analyzing_the_Collapse_of_Assad's_Regime), (diakses 21.07.2025)

Wedeen, Lisa, 2025. "Forever Has Fallen": The End of Syria's Assad, Journal Democracy, Vol. 36, Issue 2, April 2025, Hal. 50-58, <https://www.journalofdemocracy.org/articles/forever-has-fallen-the-end-of-syrias-assad/> (diakses 29.07.2025)